

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA N 15 Padang
Kelas/Semester : XI/2
Tema : Pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini.
Sub Tema : Sidang PPKI I, II dan III
Pembelajaran ke : 18
: 1 Pertemuan (30 menit)

Alokasi Waktu

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan menggunakan model pembelajaran *Discovery Learning* peserta didik mampu *menganalisis Proses dan hasil sidang PPKI I,II,III* Peserta didik mampu mengerti, paham dan menganalisis bagaimana perkembangan dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Peserta didik mampu bekerjasama dalam kerja kelompok, menghargai pendapat orang lain serta mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas dan membuat laporan kelompok.

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 18

1. Kegiatan Pendahuluan	Waktu
<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran seperti berdoa, absensi, menyiapkan buku pelajaran, memasang LCD pada laptop(<i>character building</i>).- Memotivasi peserta didik secara kontekstual sesuai dengan manfaat pembelajaran.- Menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi, literasi, dan karakter yang harus dicapai, cakupan materi dan lingkup penilaian serta penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus (<i>communication</i>).- Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. (<i>Critical Thinking</i>)- Mengaitkan materi pembelajaran dengan surat Asy Syura ayat 38 (<i>PAI</i>) dan pepatah Minang <i>bulek ayia dek pambuluh bulek kato dek mufakaik (BAM)</i>.	10 Menit
2. Kegiatan Inti	Waktu
<p><i>Stimulation</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Guru memutar sebuah gambar/video tentang Proses dan hasil sidang	15 menit

<p>PPKI I dan peserta didik memperhatikan serta mencatat poin-poin penting <i>problemstatement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah gambar/video selesai ditampilkan, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Dari pertanyaan yang diajukan peserta didik tersebut selanjutnya guru merumuskan sebuah topik diskusi (<i>critical thinking, communication</i>). <p><i>data collection</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru memfasilitasi peserta didik mencari dan menemukan informasi dengan menggunakan sumber buku atau sumber di internet (<i>literacy</i>) dan mengaitkannya dengan seruan agama tentang pentingnya membaca seperti dalam surat Al ‘Alaq ayat 1 (<i>PAI</i>). <p><i>verification</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta didik berdiskusi dan menganalisis jawaban yang telah di cari apakah sudah sesuai dengan jawaban dari topik diskusi lalu mengaitkan dengan kondisi sosial dan budaya Minangkabau (<i>BAM, critical thinking, communication, collaboration</i>). - Guru akan menghentikan diskusi setelah waktu telah habis. <p><i>generalization</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi ataupun mempertanyakan jawaban dari kelompok yang tampil (<i>critical thinking, communication, collaboration</i>). - Setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, sesi diskusi ditutup dan seluruh kelompok mengumpulkan LKPD dan laporan diskusi 	
<p>3. Kegiatan Penutup</p>	<p>Waktu</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa perwakilan peserta didik menyimpulkan pembelajaran dengan dibimbing oleh guru - Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran - Guru menginformasikan kepada peserta didik mengenai materi dan kegiatan pada pertemuan selanjutnya dan menugaskan pada setiap peserta didik untuk membaca buku. - Menutup kegiatan dengan berdoa bersama. 	<p>5 menit</p>

C. ASSESMEN/PENILAIAN

- Sikap : Menunjukkan sikap Aktif dan bisa Bekerjasama dalam diskusi kelompok
- Pengetahuan : Tes tertulis
- Keterampilan : Membuat laporan diskusi, dan mempresentasikan kerja kelompok.

Remedial akan diberikan pada peserta didik yang tidak mencapai nilai KKM (80)

Pengayaan akan diberikan pada peserta didik yang mencapai nilai di atas KKM (80)

Mengetahui
Kepala Sekolah,

Padang, 6 April 2021
Guru Mata Pelajaran

Pembentukan Badan-Badan Kelengkapan Negara

a. Sidang-Sidang PPKI 1

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI sebagai badan politik satu-satunya segera mengambil prakarsa dan tindakan politik untuk mengendalikan negara dengan menyelenggarakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu, PPKI berhasil menetapkan 3 keputusan penting, yaitu :

1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 menjadi UUD Negara RI.
2. milih dan menetapkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden (atas usulan Otto Iskandardinata)
3. Membentuk suatu Komite Nasional untuk membantu presiden

b. sidang PPKI 2

Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang kedua. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno menunjuk Mr. Achmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodimedjo untuk membentuk Panitia Kecil yang akan membicarakan bentuk departemen, bukan personalianya. Rapat

Panitia Kecil tersebut dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Dalam sidang tersebut ditetapkan beberapa keputusan, di antaranya yaitu :

1. Menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu presiden

NO	Jenis Menteri	Nama Menteri
1	Menteri Dalam Negeri	R.A.A Wiranata Kusumah
2	Menteri Luar Negeri	Mr. Ahmad Soebarjo
3	Menteri Keuangan	Mr. A. A. Maramis
4	Menteri Kehakiman	Prof. Mr. Dr. Soepomo
5	Menteri Kemakmuran	Ir. Surachman Cokroadisuryo
6	Menteri Keamanan Rakyat	Supriyadi
7	Menteri Kesehatan	dr. Buntaran Marmoatmojo
8	Menteri Pengajaran	Ki Hajar Dewantara
9	Menteri Penerangan	Mr. Amir Syarifudin
10	Menteri Sosial	Mr. Iwa Kusumasumantri
11	Menteri Pekerjaan Umum	Abikusno Cokrosuyoso
12	Menteri Perhubungan	Abikusno Cokrosuyoso

2. Membagi wilayah RI ke dalam 8 propinsi serta menunjuk para gubernurnya

Dalam menjalankan pemerintahan pada awal kemerdekaan presiden Soekarno dengan persetujuan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) membentuk 8 provinsi di Indonesia. Berikut ini 8 provinsi yang disepakati pada awal kemerdekaan Indonesia beserta nama gubernurnya:

Nama Provinsi Beserta Gubernurnya

- 1 Sumatera Teuku dengan Gubernur Mohammad Hasaan
- 2 Jawa Barat dengan Gubernur Sutardjo Kartohadikusumo
- 3 Jawa Tengah dengan gubernur R. Panji Surono
- 4 Jawa Timur dengan gubernur R.M. Suryo
- 5 Sunda Kecil (Nusa Tenggara) dengan Gubernur Mr. I. Gusti Ketut Puja
- 6 Maluku dengan Gubernur Mr. J. Latuharhary
- 7 Sulawesi dengan Gubernur R. G.S.S.J. Ratulangi
- 8 Kalimantan dengan gubernur Ir. Pangeran Mohammad Noor

3. Pembentukan Komite daerah

c. sidang PPKI 3

Selanjutnya pada sidangnya yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945, berhasil ditetapkan tiga keputusan lagi, yaitu :

1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia yang berpusat di Jakarta.
2. KNIP adalah badan yang berfungsi sebagai Pusat DPR sebelum Pemilu diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah.
3. PNI dirancang menjadi partai tunggal di Indonesia, (namun akhirnya dibatalkan)
4. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. BKR ini berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

d. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa alat-alat kelengkapan negara RI terdiri atas lembaga tinggi (Presiden, MA, DPR, DPA, BPK) dan lembaga tertinggi negara (MPR). Sementara MPR yang harus dibentuk melalui pemilu belum terbentuk, maka PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan akan membentuk Komite Nasional dengan tugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pada tanggal 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang KNIP pertama dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimedjo. Dalam sidangnya, dikeluarkan dua keputusan yaitu :

- 1) Pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) dengan jumlah anggota 15 orang,
- 2) Mengusulkan kepada presiden supaya KNIP diberi hak legislatif selama DPR/MPR belum terbentuk. Usulan ini kemudian diperkuat dengan Maklumat Wakil Presiden No. X.

Dalam perkembangan berikutnya, BP-KNIP dikuasai oleh golongan sosialis pimpinan Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin. Golongan ini mendesak pemerintah untuk segera mengizinkan dibentuknya partai-partai politik. Sebab bila hanya satu partai politik saja dikhawatirkan muncul

anggapan dari negara-negara Barat (Sekutu) bahwa Indonesia negara fasis, bukan negara demokrasi. Usul tersebut kemudian ditanggapi pemerintah dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran pemerintah untuk membentuk partai-partai politik.